

---

# REVITALISASI POSYANDU SEBAGAI GERAKAN GOTONG ROYONG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Yan Aryasmita<sup>1</sup>, Zulkieflimansyah<sup>2</sup>, Zainuddin<sup>3</sup>

Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa,

\*Corresponding Author : yankgera4@gmail.com

## Abstrak

Revitalisasi Posyandu merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu, dalam pelaksanaannya masih terbatas pada pelayanan bidang kesehatan, padahal semangat awal pembentukan posyandu menjadi pusat pelayanan terpadu masyarakat, bukan hanya pelayanan bidang kesehatan tetapi pelayanan bidang-bidang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa peraturan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait revitalisasi Posyandu. Informan dipilih dengan *purposive sampling*. Informan yang dipilih berjumlah 10 (sepuluh) orang dari unsur pimpinan daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Agen Gotong Royong, Kader Kesehatan, dan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga jalur yakni reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan revitalisasi Posyandu di Sumbawa Barat antara lain; 1) adanya perluasan ruang lingkup bidang layanan Posyandu 2) adanya perluasan sumber daya manusia/ pelaksana di posyandu 3) adanya upaya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana posyandu. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan dengan perluasan bidang layanan, perluasan sumber daya manusia dan upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di posyandu. adapun saran yang dapat disampaikan yaitu revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijadikan pembelajar bagi daerah lain untuk diterapkan dan diperlukan gerakan yang massip dari semua pihak secara bergotong royong untuk melaksanakan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat

**Kata kunci:** Revitaliasi, Posyandu, Gotong Royong

## Abstract

Revitalization of Posyandu is an effort to improve the function and performance of Posyandu, in its implementation it is still limited to health services, even though the initial spirit of the formation of Posyandu is a center for integrated community services, not only services in the health sector but services in other fields. This study aims to determine the form of the implementation of Posyandu revitalization in West Sumbawa Regency. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques using observations, interviews, and documentation in the form of regulations and policies of the West Sumbawa Regency Government related to the revitalization of Posyandu. Informants are selected with purposive sampling. The selected informants numbered 10 (ten) people from regional leadership elements, regional apparatus organizations, village governments, mutual cooperation agents, health cadres, and the community. The data obtained were analyzed using three paths namely reduction, data presentation, and drawing conclusions carried out when data collection took place. The results showed that the form of the implementation of Posyandu revitalization in West Sumbawa, among others; 1) The existence of the expansion of the scope of the Posyandu service 2) The existence of the expansion of human resources/ implementers in Posyandu 3) The existence of efforts to meet the needs of posyandu facilities and infrastructure. From the

---

results of the study, it can be concluded that the implementation of Posyandu revitalization in West Sumbawa Regency was carried out with the expansion of the service sector, the expansion of human resources and joint efforts in meeting the needs of facilities and infrastructure in the posyandu. The suggestions that can be conveyed, namely the revitalization of Posyandu in West Sumbawa Regency, can be used as a learner for other regions to be applied and a mass movement from all parties is working together to carry out the revitalization of Posyandu in West Sumbawa Regency

**Keywords :** *Revitalization, posyandu and mutual cooperation*

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan Posyandu selama ini, tidak terlepas dari sejarah pembangunan kesehatan masyarakat pada umumnya yang digagas pada tahun 1975 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Gagasan tersebut menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) untuk melaksanakan mandat konstitusional, yakni kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahap awal, kegiatan PKMD adalah untuk perbaikan gizi yang dilaksanakan melalui karang balita, penanggulangan diare melalui pos Penanggulangan diare, untuk pengobatan masyarakat di pedesaan melalui pos kesehatan, serta untuk imunisasi dan keluarga berencana melalui pos imunisasi dan pos KB desa.

Pada tahun 1984 dikeluarkan instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri, yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dalam satu wadah yang disebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sesuai dengan konsep GOBI-3F (*Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Immunization, Female Education, Family Planning, and Food Supplement*), untuk Indonesia diterjemahkan dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, Imunisasi, Gizi, dan Penanggulangan Diare. Pencanangan Posyandu untuk pertama kali oleh kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta bertepatan dengan

peringatan Hari Kesehatan Nasional. Pada tahun 1990 keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu. Pelayanan yang diberikan di posyandu bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di Posyandu tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama (Depkes RI, 1990).

Selanjutnya, pada tahun 2001, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Nomor 411.3 /1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Revitalisasi Posyandu, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu. Namun, revitalisasi posyandu ini masih “terbatas” pada pelayanan dalam bidang kesehatan, terutama Ibu dan Anak. Padahal, jika merujuk pada semangat awal pembentukan posyandu menjadi pusat pelayanan terpadu masyarakat, bukan hanya dalam bidang kesehatan tetapi pelayanan dalam bidang lainnya.

Keterbatasan cakupan dan jenis layanan Posyandu menyebabkan Posyandu sejauh ini belum menjadi pusat pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat disegala bidang. Posyandu juga belum memiliki data, dan informasi yang utuh, ketersediaan data, dan informasi terbatas pada bidang kesehatan. Sementara bidang lainnya tidak tersedia. Padahal, data dan informasi bidang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh.

---

Keterbatasan sarana dan prasarana posyandu, ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP), minimnya peningkatan kapasitas dan insentif Kader Posyandu dan beberapa persoalan lainnya menjadi kendala belum efektifnya peran Posyandu. Pelayanan Posyandu yang masih terbatas pada layanan kesehatan Ibu dan Anak juga menjadi faktor penyebab Posyandu belum dapat dirasakan seutuhnya oleh masyarakat setempat. Kehadiran Posyandu Gotong Royong, diharapkan dapat meningkatkan jenis layanan dan menambah penerima manfaat, seperti komunitas petani, nelayan, buruh dan sebagainya. Disamping itu, Posyandu juga dapat digunakan sebagai sarana konsolidasi para pendamping masyarakat (Agen Gotong Royong, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluh Pertanian, Remaja Masjid, dan lainnya) untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai bidang yang ditanganinya.

Pelaksanaan posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat bahwa selama ini pelayanan di posyandu hanya melayani bidang kesehatan ibu dan anak dengan layanan 5 (lima) meja, secara teknis yaitu : 1) pendaftaran, 2) pengukuran tinggi badan dan berat badan, 3) pencatatan, 4) penyuluhan gizi, dan 5) pelayanan kesehatan lainnya dan pengembangan pada beberapa layanan yang disesuaikan dengan posyandu keluarga sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu terdapat pengintegrasian layanan terhadap Posyandu Ibu Anak, Posbindu, Posyandu Lansia, dan/atau upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UMBK) lainnya.

Berdasarkan data Posyandu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 228 posyandu terdiri dari 42 Posyandu yang tersebar di 7 Kelurahan dan 186 posyandu

di 58 Desa dengan jumlah kader posyandu sebanyak 1140 orang dengan latar pendidikan yang berbeda, dengan keterbatasan sumber daya manusia dengan pengalaman yang ada dan dibantu oleh bidan desa dan puskesmas pelaksanaan pelayanan posyandu berjalan dengan baik.

Perubahan regulasi daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) memuat upaya perubahan Posyandu yang merupakan inovasi daerah mencakup revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi posyandu, bidang dan jenis layanan posyandu, serta tata kerja posyandu.

Keterbatasan sarana dan prasana pendukung lainnya terdapat di sebagian besar posyandu yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, terutama di beberapa kelurahan dan desa, di mana masih terdapat pelaksanaan posyandu bertempat di kolong rumah, lapangan dan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Keberadaan sarana lain seperti alat-alat kesehatan sebagai kelengkapan pelayanan kesehatan baik konsul maupun tindakan kesehatan di beberapa posyandu masih kurang sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan di posyandu.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai "Revitalisasi Posyandu sebagai Gerakan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat", sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa cakupan, bentuk layanan, ketersediaan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia/ tenaga pelaksana di posyandu dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

## A. LANDASAN TEORI

### 1. Revitaliasi

Nilawan (2008) mendefinisikan revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota, baik dari segi sosio-kultural, sosial ekonomi, segi fisik alam lingkungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya.

Revitalisasi perlu dilakukan ketika terjadinya permasalahan dan isu-isu tertentu, antara lain yaitu:

1. Ketika terjadinya kemerosotan nilai vitalitas atau produktivitas dalam suatu hal.
2. Keharusan adanya peningkatan kesadaran dalam melakukan hal yang kurang terberdaya.
3. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dari hal yang kurang terberdayakan.
4. Terjadinya pergeseran peran dan tanggung jawab.
5. Terjadinya penurunan laju penurunan pendapatan, serta menimbulkan ketidakstabilan pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses revitalisasi kawasan berdasarkan peraturan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria hal yang akan dilakukan revitalisasi, kriteria tersebut diantaranya adalah pemilihan sistem yang akan direvitalisasi, serta melihat seberapa besar penurunan produktivitas kerja.
2. Memberikan penilaian terhadap hal yang akan direvitalisasi, meliputi vitalitas sistem yang akan dibuat serta penilaian terhadap

produktivitas kerja dari sistem yang akan dijalankan.

3. Melihat potensi keberhasilan revitalisasi dengan cara mempertimbangkan keefektifan hasil dari revitalisasi yang telah dibuat dengan membuat rancangan dari sistem yang akan direvitalisasi.
4. Pengelompokan kegiatan, serta kompleksitas hal yang akan direvitalisasi.

### 2. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dimana masyarakat antara lain melalui kader-kader yang terlatih di bidang kesehatan menyelenggarakan 5 (lima) program prioritas secara terpadu pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan bantuan pelayanan dari petugas Puskesmas, bagi jenis pelayanan dimana masyarakat tidak mampu memberikan sendiri (Depkes RI, 1986).

Agar kegiatan posyandu merupakan kegiatan warga masyarakat setempat maka kader dan pemuka masyarakat berperan untuk menumbuhkan kesadaran semua warga agar menyadari bahwa Posyandu adalah milik warga. Pemerintah khususnya petugas kesehatan hanya berperan membantu (Azwar, 2002).

Dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan oleh Depkes, Posyandu secara umum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat yaitu : (1) Posyandu Pratama; (2) Posyandu Madya; (3) Posyandu Purnama dan (4). Posyandu Mandiri (Depkes RI, 2006).

#### 1. Posyandu Pratama

Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, disamping jumlah kader

---

yang terbatas, dapat pula karena belum siapnya masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader.

#### 2. Posyandu Madya

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah yaitu < 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkatkan cakupan dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu.

#### 3. Posyandu Pratama

Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih. Cakupan utamanya > 50% serta mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

#### 4. Posyandu Mandiri

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih. Cakupan dari kegiatan utamanya > 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan dana sehat, sehingga terjamin kesinambungannya.

### 3. Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi posyandu merupakan gerakan masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan khususnya anak dan balita (Ulfa, 2018). Kegiatan revitalisasi posyandu menggunakan beberapa metode pendekatan, pertama berbasis kelompok kader. Kader merupakan pilar utama penggerak pelaksanaan kegiatan posyandu. Kader sebaiknya berasal dari warga masyarakat setempat yang memahami wilayah kerjanya dan dinilai mampu bekerja secara sukarela mengelola posyandu. Sebenarnya tidak ada syarat khusus untuk menjadi seorang kader, yang terpenting bisa membaca dan menulis, memiliki waktu luang, mau bekerja secara sukarela dan ikhlas. Menjadi seorang kader posyandu juga tidak memiliki batas periode waktu, selama masih bersedia menjadi kader maka bisa dipilih kembali.

Tujuan umumnya yaitu meningkatkannya fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Sedangkan tujuan khususnya: (1) Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu, (2) Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan Posyandu, (3) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat, dan obat di Posyandu, (4) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan Posyandu, (5) Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu. (Depdagri RI, 2001).

Prinsip pelaksanaan revitalisasi, bahwa hakekat dilaksanakannya Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, yang secara umum terpuruk sebagai akibat

---

langsung maupun tidak langsung adanya krisis multi dimensi di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya Revitalisasi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu perlu dihimpun seluruh kegiatan masyarakat agar berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina dilingkungannya masing-masing, sehingga cakupan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posyandu pada hari buka dan kunjungan rumah dapat mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Dengan prinsip pelaksanaan revitalisasi adalah: (Depdagri RI, 2001).

1. Partisipasi; Revitalisasi posyandu melibatkan peran serta seluruh komponen dalam masyarakat, pemerintah dan organisasi non pemerintah, LSM, swasta dan dunia usaha.
2. Efisiensi (Hemat); Revitalisasi posyandu diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia dari masyarakat secara terorganisir dan ekonomis.
3. Efektif (Berdaya guna dan berhasil guna); Revitalisasi posyandu diupayakan untuk dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada seluruh komponen masyarakat.
4. Transparan (Terang untuk dilihat); Revitalisasi posyandu merupakan proses yang bisa diketahui oleh semua pihak.
5. Terbuka (Bisa dimasuki); Revitalisasi posyandu memberikan

kesempatan kepada semua pihak untuk berperan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

6. Adil; Revitalisasi posyandu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang mengambil bagian atau berperan.
7. Dapat dipertanggungjawabkan; Dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi posyandu dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen masyarakat dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Nilawati, 2008).

Revitalisasi posyandu dapat dicapai dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagai berikut: (Nilawati, 2008).

1. Prasarana, adanya tanah dan bangunan.
2. Sarana, adanya ruangan, alat-alat kerja, tenaga, penyediaan tenaga dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing yang ditetapkan yaitu: tenaga kesehatan puskesmas kader Pembina posyandu pengelola posyandu, dan petugas lainnya. Disamping yang tersebut diatas juga kegiatan sangat penting dalam optimalisasi revitalisasi posyandu seperti: kegiatan pelayanan pada hari buka dan hari tidak buka, hal ini merupakan kelanjutan kegiatan di dalam posyandu yaitu: program kegiatan kesehatan dan gizi seperti layanan kunjungan rumah, penggalangan partisipasi masyarakat, peningkatan kemampuan dan pembinaan posyandu, penerapan system kewaspadaan pangan dan gizi

#### **4. Gotong royong**

Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorang maupun berkelompok dalam berbagai bidang

---

pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan, serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah. Gotong royong sebagai nilai dasar pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, sungguh-sungguh sebagai sarana mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Gotong royong sebagai nilai dasar peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, soliditas dan solidaritas sosial, serta keswadayaan dan kemandirian kesejahteraan yang berkelanjutan. Gotong royong sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari generasi ke generasi;

Eksistensi gotong royong yang berakar dari budaya bangsa ini harus dibangkitkan lagi. Terlebih dari dalam konteks pembangunan yang menuntut peran serta masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Menurut Effendi (2013) dalam kajiannya tentang budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini menyimpulkan bahwa gotong royong telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita sejak lama. Dalam budaya gotong royong melekat nilai-nilai substansi modal sosial. Sebagai modal sosial, gotong royong dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih memegang teguh

prinsip gotong royong sebagai modal sosial maka lebih mudah dalam mencapai kemajuan bersama. Sebaliknya, bila nilai-nilai gotong royong yang terkandung dalam modal sosial tidak lagi menjadi pegangan dan rujukan dalam masyarakat dan komunitas bisa jadi akan mengalami kesulitan karena energi sosial bisa terbuang sia-sia dan berpotensi menghalangi mencapai tujuan kemajuan bersama. Bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial.

Kajian lainnya tentang eksistensi gotong royong juga diungkapkan oleh Irfan (2016) tentang metamorfosis gotong royong dalam rekonstruksi sosial. Dari kajian diungkapkan bahwa nilai-nilai gotong royong yang diduga pudar, ternyata masih ada. Terbukti dari adanya aktifitas spontanitas yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia manakala ada masalah yang menimpa di lapisan masyarakat kurang beruntung lainnya. Ini adalah potret potensi kepedulian sosial sebagai implementasi gotong royong. Jika gotong royong ternyata ada dan telah berubah wujud, maka sewajarnya menjadi potensi baik bagi bangsa Indonesia bahwa gotong royong masih ada. Atas potensi gotong royong ini dapat menjadi modal sosial akan kepercayaan masyarakat Indonesia akan solusi pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia. Maka sudah saatnya budaya gotong-royong kembali diperkuat dan dijadikan rujukan dan acuan dalam kehidupan berbangsa. Salah satu upaya yang dapat dipikirkan adalah memperkuat institusi sosial lokal yang selama ini masih bertumpu pada nilai-nilai kebersamaan, menjunjung tinggi moral/ etika, kejujuran, saling percaya sebagai pintu masuk menuju penguatan kembali (revitalisasi) budaya gotong royong.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Revitalisasi posyandu telah dilakukan sejumlah peneliti, seperti yang dilakukan oleh

---

Widiastuti (2008) dkk, penelitian yang berjudul "*Revitalisasi posyandu di Kabupaten Lombok Tengah*", penelitian berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan bertujuan untuk mengetahui proses revitalisasi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses revitalisasi posyandu di Kabupaten Lombok Tengah, berangkat dari Kasus Gizi buruk yang mencuat di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 mengagetkan masyarakat Indonesia, terlebih karena daerah Nusa Tenggara Barat merupakan daerah lumbung beras yang terkenal dengan swasembada pangannya namun masih menyisakan masalah gizi buruk yang menjadikan daerah NTB sebagai status Siaga untuk Gizi Buruk. Selain kasus gizi buruk persalinan ke tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah juga masih tinggi mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Posyandu. Namun setelah beberapa tahun terakhir cakupan kegiatan revitalisasi posyandu belum menunjukkan hasil yang signifikan. Cakupan D/S masih rendah, gizi buruk masih tinggi dan persalinan ke tenaga kesehatan juga masih rendah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan langsung melakukan observasi dan wawancara di lapangan terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, makalah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Revitalisasi Posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses revitalisasi posyandu belum berjalan dengan baik. Pelatihan kader masih belum menyentuh semua kader posyandu, kegiatan posyandu masih belum berjalan dengan seharusnya, pembinaan belum maksimal dilakukan baik oleh para tim pembina di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,

maupun oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat juga masih rendah dimana masih kurangnya jumlah dana sehat yang mendukung kegiatan posyandu di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya proses revitalisasi posyandu di Kabupaten Lombok Tengah antara lain ketersediaan input (sarana dan parasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia), komitmen (internal dan eksternal) dan budaya masyarakat (nilai dan kebiasaan). Di Kabupaten Lombok Tengah komitmen sangat mempengaruhi proses revitalisasi posyandu. Komitmen eksternal yang kurang dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses revitalisasi posyandu menyebabkan kurang berhasilnya proses revitalisasi posyandu. Pelaksanaan yang gagal dalam proses revitalisasi posyandu yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu sehingga posyandu belum dapat dikatakan milik masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Ketersediaan input tidak memadai dan budaya masyarakat berupa nilai dan kebiasaan bersalin ke dukun beranak juga mengakibatkan proses revitalisasi posyandu belum dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian peneliti merekomendasikan agar komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses revitalisasi posyandu termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan dukun beranak dapat ditingkatkan sehingga upaya peningkatan kinerja revitalisasi ini benar-benar dapat terwujud. Disamping itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam mendukung proses revitalisasi posyandu hendaknya memperhatikan budaya masyarakat setempat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variable yang diteliti sama-sama tentang revitalisasi posyandu, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan

---

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian di mana penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat

Selanjutnya, Penelitian tentang Revitalisasi posyandu telah dilakukan sejumlah peneliti, seperti yang dilakukan oleh Eddy Suharyanto (2020) yang berjudul *“Analisis Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Citeureup Kota Cimahi”*, dengan menganalisis fenomena perkembangan keberadaan posyandu secara kuantitas di Indonesia sangat baik tetapi secara kualitas pelayanan posyandu mengalami penurunan diakibatkan beberapa faktor. Penelitian yang berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Citeureup Kota Cimahi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan revitalisasi posyandu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Hasil analisis pelaksanaan revitalisasi posyandu di wilayah kerja puskesmas Citeureup kota Cimahi, dari data hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan selama 3 (tiga) tahun terakhir diketahui masih ada beberapa indikator yang memerlukan perhatian cukup besar.

Adapun hasil penelitiannya bahwa kegiatan revitalisasi posyandu terlaksana dengan baik, adanya partisipasi publik melalui fikiran, ide, tenaga dan keahlian. Pelatihan untuk kader posyandu belum ideal yang mana layanan posyandu memiliki lima meja dan kunjungan ke rumah masyarakat belum cukup baik dan fasilitas yang belum memadai.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti sama-sama tentang revitalisasi posyandu, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian di

mana penelitian terdahulu berlokasi di Puskesmas Citeureup Kota Cimahi sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 bertempat di Posyandu Mawar Merah Desa Senayan, kantor Desa Senayan, dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil observasi, jawaban informan, dan data dokumentasi terkait pertanyaan tentang pelaksanaan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, maka informan tidak hanya berasal dari kalangan pejabat pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Agen Gotong Royong, Kader kesehatan/ posyandu, LSM, tetapi juga melibatkan masyarakat. Informan atau responden yang akan dijadikan obyek untuk di wawancarai adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemberdayaan Gotong Royong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Agen Gotong Royong, Kader Kesehatan/ Posyandu, dan tokoh masyarakat.

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diolah lebih lanjut dan dipublikasikan oleh pihak lembaga yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari

---

peraturan-peraturan daerah dan dokumentasi berupa dokumen dalam bentuk tulisan peraturan, kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan berita resmi terkait revitalisasi Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Cakupan Bidang Layanan Pelaksanaan Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan revitalisasi di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap 228 Posyandu Gotong Royong, sesuai dengan data yang dianalisa hasil wawancara dan dokumentasi, bahwa terdapat perluasan bidang layanan yang terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Adapun bidang-bidang pelayanan di posyandu Gotong Royong sebagai berikut :

- a. Bidang kesehatan; khususnya pelayanan Angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA), pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi (Tuntas 5 pilar STBM), kesehatan lanjut usia; Bina Keluarga Balita (BKB), kesehatan reproduksi remaja, bina ketahanan keluarga dan layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat.
- b. Bidang Ekonomi, UMKM, Koperasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, terutama terhadap warga dan/atau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi/miskin.
- c. Bidang sosial kemasyarakatan, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlindungan perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
- d. Bidang pertanian, peternakan, pekerbunan, kelautan, kehutanan dan bidang lainnya.

#### 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan revitalisasi di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap 228 Posyandu Gotong Royong, sesuai dengan data yang dianalisa hasil wawancara dan dokumentasi, bahwa ada upaya bersama Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta, dan masyarakat dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat misalnya melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan mendukung keberadaan sarana dan prasarana pendukung seperti Pemerintah Desa merencanakan anggaran kegiatan melalui APBDes untuk pengadaan sarana posyandu, terlebih Pemerintah Daerah pada tahun 2020 telah mengeluarkan surat edaran Bupati Sumbawa Barat terkait 25% Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh desa diperuntukkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Posyandu Gotong Royong. Selain itu, pihak swasta atau *penta heliks* juga ikut membantu Pelaksanaan Posyandu Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat melalui dana *Cooperate Social Responsibility* (CSR) yang diperuntukkan pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Gotong Royong.

#### 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia/ Pelaksana Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan revitalisasi di Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ketersediaan Sumber daya manusia di Posyandu Gotong Royong, sesuai dengan data yang dianalisa hasil wawancara dan dokumentasi bahwa, selain kader posyandu atau tenaga kesehatan, juga terdapat pelibatan berbagai aktor strategis lainnya yang

---

ada di desa/kelurahan atau lingkungan setempat, seperti Agen Gotong Royong, Pendamping Desa, Pendamping PKH, Remaja Mesjid, Karang Taruna, Penyuluh Pertanian, dan stakeholders strategis lainnya.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pelaksanaan revitalisasi Posyandu dilaksanakan pada 228 posyandu dengan ruang lingkup serta ragam bentuk bidang layanan di posyandu. *Kedua*, Pemenuhan Sarana dan prasarana posyandu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, serta kepedulian pihak swasta, dan *ketiga*, terdapat penambahan aktor penggerak seperti : kader kesehatan, Agen Gotong Royong, Pendamping Desa, Pendamping PKH, Remaja Mesjid, Karang Taruna, Penyuluh Pertanian, dan actor/ stakeholders strategis lainnya dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam upaya mendorong pelaksanaan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat, beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan wajah baru dari pelaksanaan Posyandu di Nusa Tenggara Barat dan merupakan salah satu inovasi daerah, tentunya menjadi pembelajar dan contoh baik bagi daerah lain untuk dapat diterapkan. (2) Diperlukan gerakan yang massip dari semua pihak baik Pemerintah Daerah, Swasta maupun seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dengan keberadaan dan keberlangsungan Posyandu Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku, Desertasi, Jurnal, dan Berita Online

Abdulkadir. 2017. *Evaluasi Implementasi PDPGR di Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Sumbawa*

*Barat*. Desertasi Universitas Negeri Jakarta

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Anonim. 2022. *Bupati Ajak Sukseskan Posyandu Gotong Royong*. <http://www.google.com/amp/s/lombo.kpost.iawapos.com/sumbawa/28/03/2022/bupati-ajak-sukseskan-posyandu-gotong-royong/amp/>

. Diakses tanggal 5 Januari 2022 pukul 14.10 WITA.2022. *Bupati KSB Ingatkan Program Posyandu Gotong Royong Dan*

*AGR*.<https://www.sumbawabaratpost.com/2022/04/01/bupati-ksb-ingatkan-program-posyandu-gotong-royong-dan-agr/>.

Diakses tanggal 12

Januari 2022 pukul 14.25 WITA.

2022. *Posko Posyandu Gotong Royong Pakai Dana CSR*.

<https://www.suarantb.com/2022/04/26/posko-posyandu-gotong-royong-pakai-dana-csr/>. Diakses tanggal 22

Februari 2022 pukul 14.00 WITA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta : Rineka Cipta

Effendi, Noer Tadjuddin. 2013. *Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat ini*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1 , Mei 2013

Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mariana, Dede. 2010. *Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan*. Journal of Governance, Vol. 1, No. 1.

Herdiansyah, Heri. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penulisan Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif* .Yogjakarta: UII Press.

Irfan, Maulana. 2016. *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Konstruksi*

- 
- Sosial*. Prosiding Riset dan PKM Vol. 4 No. 1 Desember 2016
- Noor, Dr. Iwan. 2017. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press.
- Sudrajat, M Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka setia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Posyandu*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang *Revitalisasi Posyandu*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong*
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Posyandu Gotong Royong